

Mengukur Kendali dan Keberhasilan: Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum

Payamta Payamta, Titik Setyaningsih
Universitas Sebelas Maret
payamtaakuntan@gmail.com

ABSTRACT: *This research aims to evaluate the effectiveness of the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) in the context of State Universities (PTN) with Legal Entity status. The research focuses on the impact of regulatory changes, changes in governance structure, and government policies on the implementation of SPIP in these institutions. A survey method was employed using survey instruments delivered through focus group discussions (FGD) and questionnaires distributed to officials responsible for financial management and Internal Control Units in PTN with Legal Entity status. The survey results indicate that factors such as ambiguous regulatory changes, alterations in governance structure, and government policies limiting budgets affect the implementation of SPIP. The research also provides recommendations for improving regulations, expanding SPIP training, demonstrating strong leadership commitment, and implementing better monitoring systems to enhance the effectiveness of SPIP in PTN with Legal Entity status.*

Keywords: *SPIP, State Universities, Legal Entity, regulations, government policies, leadership commitment, monitoring, accountability.*

ABSTRACT : Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam konteks Universitas Negeri (PTN) yang memiliki status Badan Hukum. Penelitian ini berfokus pada dampak perubahan regulasi, perubahan struktur tata kelola, dan kebijakan pemerintah terhadap implementasi SPIP di institusi-institusi ini. Metode survei digunakan dengan menggunakan instrumen survei yang disampaikan melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) dan kuesioner yang didistribusikan kepada pejabat yang bertanggung jawab atas manajemen keuangan dan Unit Pengendalian Intern di PTN dengan status Badan Hukum. Hasil survei menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti perubahan regulasi yang ambigu, perubahan dalam struktur tata kelola, dan kebijakan pemerintah yang membatasi anggaran berdampak pada implementasi SPIP. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan regulasi, memperluas pelatihan SPIP, menunjukkan komitmen kepemimpinan yang kuat, dan mengimplementasikan sistem pemantauan yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas SPIP di PTN dengan status Badan Hukum.

Kata Kunci : SPIP, Universitas Negeri, Badan Hukum, regulasi, kebijakan pemerintah, komitmen kepemimpinan, pemantauan, akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas keuangan adalah aspek penting dalam menjaga integritas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Di lingkungan pendidikan tinggi, kampus-kampus PTN (Perguruan Tinggi Negeri) berbadan

hukum memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya publik dan dana pendidikan. Dalam upaya untuk memastikan efisiensi, penghindaran risiko, dan pencapaian tujuan organisasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi semakin penting. SPIP adalah

suatu kerangka kerja yang dirancang untuk membantu organisasi pemerintah, termasuk lembaga pendidikan tinggi, mengelola risiko, memastikan akuntabilitas, dan meningkatkan efektivitas operasional. Dalam konteks kampus PTN berbadan hukum, SPIP menjadi instrumen penting untuk mencapai tata kelola yang baik, yang pada gilirannya mendukung pencapaian visi dan misi institusi serta kepuasan pemangku kepentingan. Namun, meskipun pentingnya SPIP telah diakui secara luas, evaluasi efektivitas implementasinya di kampus PTN berbadan hukum masih merupakan tantangan. Dalam artikel ini, kami akan melakukan evaluasi komprehensif terhadap SPIP yang diterapkan di lingkungan kampus PTN berbadan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kendali yang ada dan menilai sejauh mana SPIP telah mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dengan demikian, artikel ini akan menyajikan hasil dari evaluasi SPIP yang dilakukan di sejumlah kampus PTN berbadan hukum. Kami akan menyoroti temuan-temuan utama yang mungkin mengarah pada perbaikan dalam implementasi SPIP dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk memperkuat tata kelola keuangan di lembaga-lembaga ini. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan panduan dan wawasan yang berguna bagi para pengambil keputusan, staf administrasi, dan pihak terkait lainnya di kampus PTN berbadan hukum. Dalam artikel ini, kami akan membedah pentingnya SPIP, metodologi penelitian yang digunakan, serta hasil dan rekomendasi yang muncul dari evaluasi tersebut. Dengan begitu, kami berharap artikel ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang implementasi SPIP di kampus PTN berbadan hukum, serta memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan akuntabel.

Konsep Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berbadan hukum mengacu pada PTN yang memiliki entitas hukum tersendiri

yang terpisah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah di mana PTN tersebut berada. Ini berarti PTN berbadan hukum memiliki status hukum sebagai badan hukum yang mandiri, yang memungkinkan mereka untuk memiliki hak dan kewajiban hukum secara independen, termasuk dalam hal kepemilikan aset, pengelolaan dana, dan kerjasama dengan pihak ketiga. Perbedaan utama antara PTN berbadan hukum dengan PTN jenis lainnya, seperti PTN Badan Hukum, adalah dalam status hukum mereka. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PTN berbadan hukum didefinisikan sebagai berikut:

Pasal 35 (1): Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat memiliki badan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam Pasal tersebut, ditegaskan bahwa PTN berbadan hukum adalah PTN yang memiliki badan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Ini berarti mereka memiliki entitas hukum yang terpisah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah tempat PTN tersebut berada. Hal ini memungkinkan PTN berbadan hukum untuk melakukan tindakan hukum, seperti mengelola keuangan mereka sendiri, menjalin kemitraan dengan sektor swasta, dan memiliki hak kepemilikan terhadap aset mereka sendiri. Ini memberikan PTN berbadan hukum tingkat fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan mereka.

Karakteristik	PTN Berbadan Hukum	PTN BLUD	PTN Satker
Status	Badan hukum	Badan Layanan Umum	Satuan kerja
Otonomi	Otonom	Otonomi terbatas	Tidak otonom
Pengelolaan keuangan	Tidak termasuk dalam APBN	Termasuk dalam APBN	Termasuk dalam APBN
Pendapatan	Tidak termasuk PNBP	Termasuk PNBP	Tidak termasuk PNBP

Aset	Merupakan aset negara yang dipisahkan	Merupakan aset negara yang dikonsolidasikan dalam BMN	Merupakan aset negara yang dikonsolidasikan dalam BMN
Penyelenggaraan program studi	Mandiri	Terbatas	Terbatas
Penyelenggaraan kegiatan non-akademik	Mandiri	Mandiri	Tidak mandiri
Pelaporan keuangan	Tidak kepada APBN	Kepada APBN	Kepada APBN

Sumber: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 62 tentang Pendidikan Tinggi yang menjelaskan mengenai perbedaan karakteristik PTN-BH, PTN-BLU, dan PTN-Satker.

Berikut ini karakteristik PTN Berbadan Hukum, PTN BLUD, dan PTN Satker: Pada dasarnya, PTN di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu PTN Berbadan Hukum (PTN-BH), PTN Badan Layanan Umum (PTN-BLU), dan PTN Satuan Kerja (PTN-Satker). Ketiga jenis PTN tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi status, otonomi, pengelolaan keuangan, aset, penyelenggaraan program studi, penyelenggaraan kegiatan non-akademik, maupun pelaporan keuangan.

PTN Berbadan Hukum

PTN-BH adalah PTN yang memiliki status badan hukum yang otonom. Hal ini berarti bahwa PTN-BH memiliki kewenangan penuh dalam mengelola keuangan, aset, dan penyelenggaraan program studi. PTN-BH juga tidak termasuk dalam APBN, sehingga pendapatannya tidak termasuk PNBPN. PTN-BH dapat melakukan kegiatan non-akademik secara mandiri.

PTN Badan Layanan Umum

PTN-BLU adalah PTN yang memiliki status badan layanan umum. PTN-BLU memiliki otonomi terbatas dalam pengelolaan keuangan dan aset. PTN-BLU termasuk dalam APBN, sehingga pendapatannya termasuk PNBPN. PTN-BLU dapat melakukan kegiatan non-akademik secara mandiri.

PTN Satuan Kerja

PTN-Satker adalah PTN yang memiliki status satuan kerja di bawah naungan kementerian. PTN-Satker tidak memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, aset, dan penyelenggaraan program studi. PTN-Satker termasuk dalam APBN, sehingga pendapatannya termasuk PNBPN. PTN-Satker tidak dapat melakukan kegiatan non-akademik secara mandiri.

Permasalahan terkait ketidak efektifan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berbadan hukum merupakan tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya keuangan dan akuntabilitas publik. Pentingnya SPIP dalam mencapai tata kelola keuangan yang baik di PTN berbadan hukum menjadi semakin krusial seiring dengan berbagai perubahan regulasi, struktur tata kelola, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi lingkungan pendidikan tinggi.

Sebagian besar PTN berbadan hukum menghadapi perubahan regulasi yang kompleks, baik yang terkait dengan SPIP maupun aspek lainnya dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman dan kesiapan institusi dalam menerapkan SPIP. Selain itu, perubahan struktur tata kelola, seperti pemisahan kewenangan keuangan, juga dapat mempengaruhi implementasi SPIP, karena dapat mengakibatkan pergeseran tanggung jawab dan pembagian peran di dalam PTN. Kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan anggaran dan pembiayaan pendidikan, juga dapat mempengaruhi sumber daya yang tersedia untuk implementasi SPIP. Terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia yang sesuai dapat menjadi hambatan serius dalam menjalankan SPIP dengan efektif.

Untuk mengatasi ketidakefektifan implementasi SPIP, PTN berbadan hukum perlu memperkuat pemahaman SPIP di seluruh lapisan staf dan mengkomunikasikan komitmen pimpinan untuk mendukung

implementasi ini. Kebijakan dan pedoman yang jelas serta pemantauan dan evaluasi yang teratur perlu diterapkan untuk memastikan bahwa SPIP berjalan dengan baik. Dalam konteks perubahan regulasi, struktur tata kelola, dan kebijakan pemerintah, PTN berbadan hukum perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan merespons perubahan dengan cepat. Fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan kemitraan dengan pemangku kepentingan eksternal juga dapat membantu dalam mengatasi perubahan lingkungan yang dinamis. Dengan pemahaman yang kuat, komitmen pimpinan, dan adaptabilitas, PTN berbadan hukum dapat meningkatkan efektivitas implementasi SPIP. Ini bukan hanya tentang mematuhi regulasi, tetapi juga tentang mencapai tujuan akademik dan pengelolaan keuangan yang baik demi keberlanjutan institusi dan kualitas pendidikan yang lebih baik bagi mahasiswa.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk (1) mengidentifikasi permasalahan terkait dengan ketidak efektifan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berbadan hukum. Ini mencakup pemahaman perubahan regulasi, perubahan struktur tata kelola, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi implementasi SPIP, (2) menganalisis faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab ketidak efektifan implementasi SPIP di PTN berbadan hukum, seperti dampak perubahan regulasi, perubahan struktur tata kelola, dan kebijakan pemerintah, (3) memberikan solusi dan rekomendasi yang relevan untuk mengatasi ketidakefektifan implementasi SPIP. Artikel ini dapat memberikan panduan tentang bagaimana PTN berbadan hukum dapat meningkatkan tata kelola keuangan mereka, (4) memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran SPIP dalam lingkungan pendidikan tinggi dan mengapa implementasinya dapat menjadi isu yang kompleks dan penting, (5) mendorong kajian lanjutan tentang implementasi SPIP

di PTN berbadan hukum. Melalui artikel ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembaca, terutama para pengambil keputusan di PTN berbadan hukum, dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas publik di lingkungan pendidikan tinggi.

KAJIAN LITERATUR

Pendekatan teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) memainkan peran penting dalam penelitian ini. Sementara pendekatan teori agensi lebih fokus pada kontrak dan hubungan antara prinsipal dan agen, pendekatan teori pemangku kepentingan lebih menekankan pada kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu. Teori ini membantu mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara berbagai pemangku kepentingan dalam konteks implementasi SPIP di PTN Berbadan Hukum. Freeman dan rekan-rekannya (2010) memandang pemangku kepentingan sebagai seluruh pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi dan bisa memengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, tujuan, dan kebijakan organisasi. Pemangku kepentingan dapat dibagi menjadi tiga kelompok: pemangku kepentingan utama, pemangku kepentingan sekunder, dan pemangku kepentingan kunci.

Pemangku kepentingan utama adalah pihak yang memiliki kaitan kepentingan langsung dengan kebijakan atau program yang sedang dijalankan. Mereka memiliki peran penentu dalam pengambilan keputusan. Pemangku kepentingan sekunder, sementara itu, mungkin tidak memiliki kepentingan langsung tetapi tetap memiliki perhatian terhadap isu yang ada dan dapat memengaruhi opini masyarakat serta kebijakan pemerintah. Terakhir, pemangku kepentingan kunci adalah pihak yang memiliki kewenangan legal dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan teori

pemangku kepentingan akan membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis peran serta pengaruh berbagai pemangku kepentingan, seperti pimpinan PTN, auditor internal, dan lainnya, terhadap efektivitas implementasi SPIP. Penelitian akan memfokuskan pada pemangku kepentingan utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan SPIP dan berperan penting dalam proses pengambilan keputusan terkait SPIP. Ini mencerminkan pendekatan dari model pertama yang dijelaskan oleh Freeman (1983), yang menekankan pada cara perusahaan mengelola hubungannya dengan pemangku kepentingan utama dalam mengambil keputusan strategis.

Dalam analisis dan pengembangan penelitian ini, teori pemangku kepentingan akan membantu dalam memahami peran dan hubungan antara pemangku kepentingan dalam konteks efektivitas SPIP di PTN Berbadan Hukum. pendekatan ini mencakup analisis dan penilaian dampak pemangku kepentingan pada SPIP, serta bagaimana SPIP dapat menjawab kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan yang beragam. Dengan memahami dinamika ini, penelitian akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi SPIP dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya.

Telaah literatur mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia memberikan gambaran yang beragam tentang efektivitas implementasi SPIP serta dampaknya pada pengelolaan keuangan dan akuntabilitas. Thoyibatun (2009) menunjukkan bahwa SPIP berperan penting dalam mengurangi risiko penggelapan dan kecurangan akuntansi di perguruan tinggi. Wilopo (2006) menyatakan bahwa SPIP yang efektif dapat memberikan perlindungan terhadap niat kecurangan anggota organisasi. Hasil temuan BPK tahun 2019 menyebutkan terdapat kelemahan dalam

sistem pengendalian intern (SPI) sehingga menyebabkan kerugian senilai Rp11,55 triliun. Kasus tersebut berasal dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp10,06 triliun dan ketidakhematan, ketidakefisienan, serta ketidakefektifan senilai Rp1,49 triliun. Zamzani dan Faiz (2015) mengungkapkan bahwa meskipun terdapat elemen-elemen aset pengendalian internal yang cukup efektif di perguruan tinggi X, masih terdapat kelemahan dalam kepatuhan terhadap standar operasional prosedur. Penelitian Wulandari, Hasan, dan Rasuli (2019) menekankan pentingnya pengawasan internal yang kuat untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan aset di perguruan tinggi. Asy'ari, Prasetyono, dan Haryadi (2013) mencatat bahwa meskipun SPIP telah dibentuk di perguruan tinggi, implementasinya belum mencapai tingkat maksimal.

Irfan (2016) mengungkapkan bahwa antara tahun 2006 hingga 2016 terdapat 37 kasus dugaan korupsi di perguruan tinggi dengan kerugian mencapai 218,4 miliar. Harwida (2015) menyoroti potensi fraud di perguruan tinggi akibat kurangnya pengendalian internal, terutama dalam pemisahan fungsi pada level terkecil pengguna anggaran. Holter dan Seganish (2014) menggarisbawahi peran SPIP dalam mengidentifikasi penghematan biaya, ketidakefisienan proses, dan pengurangan risiko. SPIP juga dapat menilai proses dan kualitas kinerja serta memastikan tujuan perguruan tinggi tercapai. Implementasi SPIP memiliki dampak signifikan pada manajemen keuangan, akuntabilitas, dan pencegahan kecurangan perguruan tinggi di Indonesia. Upaya perbaikan dalam SPIP dan pengawasan internal menjadi penting dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam mencapai efektivitas operasional dan keuangan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Ketidakefektifan implementasi Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Berbadan Hukum dikaji melalui pendekatan kualitatif untuk mendalami kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi SPIP. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi masalah, yaitu ketidakefektifan implementasi SPIP di PTN Berbadan Hukum, terkait dengan dampak perubahan regulasi, perubahan struktur tata kelola, dan kebijakan pemerintah. Untuk mengumpulkan data yang relevan, berbagai sumber informasi dianalisis, termasuk regulasi terkait SPIP, PP 60 tahun 2008, struktur tata kelola PTN Berbadan Hukum, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi PTN, laporan hasil evaluasi SPIP di lingkungan PTN tersebut, dan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pimpinan PTN Berbadan Hukum, auditor internal, dan pemangku kepentingan lainnya.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan memberikan perhatian khusus diberikan pada mencari hubungan antara perubahan regulasi, perubahan struktur tata kelola, dan kebijakan pemerintah dengan ketidak efektifan implementasi SPIP di PTN Berbadan Hukum. Pertanyaan penelitian digunakan sebagai panduan dalam mengarahkan analisis, seperti mengidentifikasi dampak konkret dari perubahan regulasi pada praktik SPIP di PTN dan mencari pola dalam kebijakan pemerintah yang mungkin menghambat implementasi SPIP. Setelah data dianalisis, kesimpulan ditarik untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Dari hasil analisis, dapat diidentifikasi dampak konkret perubahan regulasi, perubahan struktur tata kelola, dan kebijakan pemerintah terhadap implementasi SPIP.

Pada tanggal 28 Oktober 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan 21 PTN sebagai PTN-BH. Pengelola keuangan dan pengurus serta auditor dari satuan pengawasan internal dari 21 PTN tersebut mengadakan forum grup diskusi (FGD) untuk membahas pengelolaan

keuangan PTN-BH. Dalam FGD tersebut, peserta membahas berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan PTN-BH. Salah satu tantangan yang dibahas adalah bagaimana mengelola keuangan PTN-BH secara transparan dan akuntabel. Peserta juga membahas bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran PTN-BH. Peserta FGD sepakat bahwa pengelolaan keuangan PTN-BH harus dilakukan secara profesional dan akuntabel. Pengelola keuangan PTN-BH harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. FGD tersebut merupakan langkah awal untuk meningkatkan pengelolaan keuangan PTN-BH. Peserta FGD berharap bahwa FGD tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat membantu PTN-BH dalam mengelola keuangannya secara lebih baik. Berikut adalah beberapa poin penting yang dibahas dalam FGD tersebut: (a) Tantangan dan peluang dalam pengelolaan keuangan PTN-BH; (b) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan PTN-BH; (c). Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran PTN-BH; (d) Prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. FGD tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi PTN-BH dalam menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan hasil penelitian adalah tentang perbedaan persepsi di antara kelompok responden. Perbedaan tersebut meliputi: (a) Perbedaan persepsi gender. Responden wanita mungkin lebih cenderung untuk melihat sisi positif dari perubahan, termasuk perubahan regulasi dan struktur tata kelola PTN dan (b) Perbedaan pengalaman. Responden wanita mungkin memiliki pengalaman yang lebih positif dalam implementasi SPIP. Berdasarkan latar belakang pendidikan, responden dengan gelar S3 atau Guru Besar cenderung lebih positif terhadap dampak perubahan struktur tata kelola PTN terhadap pelaksanaan SPIP.

Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: (a) Perbedaan pemahaman. Responden dengan gelar S3 atau Guru Besar mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsep dan prinsip SPIP dan (b) Perbedaan pengalaman. Responden dengan gelar S3 atau Guru Besar mungkin memiliki pengalaman yang lebih luas dalam implementasi SPIP. Berdasarkan latar belakang keilmuan, responden dengan latar belakang keilmuan ilmu sosial cenderung lebih positif terhadap pelatihan lebih lanjut sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas implementasi SPIP. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: (a) Perbedaan pemahaman. Responden dengan latar belakang keilmuan ilmu sosial mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pelatihan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang SPIP dan (b) Perbedaan pengalaman. Responden dengan latar belakang keilmuan ilmu sosial mungkin memiliki pengalaman yang lebih luas dalam pelatihan.

Secara keseluruhan, temuan berdasarkan karakteristik responden tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persepsi tentang efektivitas implementasi SPIP di PTN berbadan hukum. Faktor-faktor tersebut antara lain jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan latar belakang keilmuan. Temuan ini dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi SPIP di PTN berbadan hukum. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain: (a) meningkatkan sosialisasi dan pelatihan SPIP secara berkala kepada seluruh pemangku kepentingan, tanpa memandang jenis kelamin, latar belakang pendidikan, atau latar belakang keilmuan, (b) melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan SPIP untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang ada, (c) mengembangkan kebijakan dan strategi yang lebih komprehensif untuk mendukung implementasi SPIP.

Efektivitas SPIP di PTN BH dipengaruhi oleh sejumlah faktor determinan yang kompleks. Dalam konteks ini, regulasi dan kebijakan pemerintah memainkan peran sentral. Perubahan regulasi, terutama terkait dengan SPIP, dapat berdampak besar pada implementasi SPIP di PTN Berbadan Hukum. Regulasi yang ambigu, berubah-ubah, atau terlalu kompleks dapat menjadi hambatan serius. Sebagai contoh, teori administrasi publik menyatakan: "Sistem Pengendalian Intern pemerintah yang efektif membutuhkan regulasi yang jelas dan dapat diterapkan, serta kebijakan yang mendukung praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitas."

Selain itu kebijakan pemerintah terkait anggaran dan pembiayaan pendidikan juga memiliki dampak besar pada SPIP. Kebijakan yang membatasi anggaran atau tidak memprioritaskan SPIP dapat menghambat efektivitasnya. Dalam hal ini, teori ekonomi publik menunjukkan bahwa kebijakan anggaran yang tidak mendukung praktik manajemen keuangan yang baik dapat menyebabkan inefisiensi dan pengelolaan keuangan yang buruk. Namun, faktor-faktor internal juga berperan penting. Pemahaman dan komitmen pimpinan PTN Berbadan Hukum sangat signifikan. Pemahaman yang baik tentang SPIP oleh pimpinan menciptakan landasan yang kuat untuk implementasi yang efektif. Teori manajemen organisasi menyoroti pentingnya peran pimpinan dalam membentuk budaya organisasi yang mendukung akuntabilitas. Selain itu, struktur tata kelola PTN Berbadan Hukum memiliki dampak besar. Perubahan dalam struktur tata kelola dapat berdampak positif jika memperjelas tanggung jawab dan tugas terkait SPIP. Namun, pengelolaan yang efektif juga memerlukan budaya organisasi yang mendorong akuntabilitas dan transparansi. Teori manajemen organisasi menekankan pentingnya budaya dalam pengelolaan efektif. Selain faktor-faktor internal, pelatihan dan pengembangan pemahaman

dan keterampilan personil adalah kunci. Pendidikan dan pelatihan terkait SPIP diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan personil. Pemahaman yang mendalam tentang SPIP dapat meningkatkan pelaksanaan yang efektif.

Sistem pemantauan dan evaluasi internal juga merupakan elemen penting. Sistem pemantauan yang berkualitas dan evaluasi yang komprehensif membantu dalam mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan. Teori manajemen kinerja menyoroti peran penting sistem pemantauan dan evaluasi dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks ini, partisipasi pemangku kepentingan juga harus diperhatikan. Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk fakultas, staf administrasi, mahasiswa, dan pihak eksternal, dalam proses SPIP dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas. Teori partisipasi publik menekankan pentingnya melibatkan semua pihak yang terkait. Akhirnya, konteks eksternal seperti perubahan dalam lingkungan pendidikan atau faktor ekonomi dan sosial juga memengaruhi pelaksanaan SPIP di PTN Berbadan Hukum. Dalam mengatasi faktor-faktor ini, pendekatan holistik yang mempertimbangkan regulasi yang lebih baik, komitmen pimpinan, pembinaan budaya akuntabilitas, pelatihan, serta pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas SPIP. Dalam konteks SPIP, integrasi teori dan praktek adalah kunci untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Berbadan Hukum seringkali tidak mencapai efektivitas yang diharapkan. Faktor-faktor yang telah diteliti, yaitu perubahan regulasi, perubahan struktur tata kelola, dan kebijakan pemerintah, ternyata memiliki dampak yang signifikan. Penelitian ini memberikan pandangan yang dalam tentang tantangan yang dihadapi PTN

Berbadan Hukum dalam mencapai standar akuntabilitas dan pengendalian internal yang lebih baik. Dampak dari perubahan regulasi yang kurang jelas dan sering berubah memberikan pelajaran berharga tentang perlunya regulasi yang adaptif dan terkini untuk mendukung implementasi SPIP yang efektif. Perubahan kebijakan dan keterbatasan anggaran telah menjadi hambatan serius. Namun, tidak hanya faktor eksternal yang berperan, faktor internal seperti pemahaman dan komitmen pimpinan, struktur tata kelola yang efisien, budaya organisasi yang mendorong akuntabilitas, dan pemahaman serta keterampilan personil juga memengaruhi efektivitas SPIP. Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peran aktif pimpinan PTN Berbadan Hukum dalam memastikan komitmen yang kuat terhadap SPIP dan menciptakan budaya organisasi yang mendukung.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah implementasi SPIP di PTN Berbadan Hukum belum efektif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi SPIP di konteks PTN dan memberikan dasar untuk mengatasi ketidakefektifan tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi SPIP di lingkungan PTN Berbadan Hukum. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan SPIP secara berkala kepada seluruh pemangku kepentingan di PTN Berbadan Hukum. Pemahaman yang baik mengenai SPIP menjadi landasan utama dalam implementasinya. Kedua, pimpinan PTN Berbadan Hukum harus menunjukkan kebijakan dan komitmen yang kuat terhadap SPIP. Dukungan penuh dari segi anggaran dan sumber daya manusia menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi. Terakhir, pemantauan dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan SPIP diterapkan secara efektif. Hasil pemantauan dan evaluasi

dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan implementasi SPIP di masa yang akan datang. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi SPIP di PTN Berbadan Hukum dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pencapaian tujuan akademik serta pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pendidikan tinggi.

Meskipun temuan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hambatan dan tantangan yang dihadapi PTN Berbadan Hukum dalam implementasi SPIP, penelitian ini juga memiliki keterbatasan. Sampel responden yang relatif kecil mungkin tidak mewakili keragaman pendapat dan pengalaman yang ada di seluruh PTN Berbadan Hukum. Selain itu, faktor-faktor

eksternal yang mungkin memengaruhi SPIP belum sepenuhnya dieksplorasi. Sebagai rekomendasi, diperlukan perbaikan regulasi yang lebih adaptif, program pelatihan SPIP yang lebih luas dan mendalam, komitmen pimpinan yang kuat, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih baik. Harapannya PTN Berbadan Hukum akan dapat mencapai implementasi SPIP yang lebih efektif dan pada akhirnya, berkontribusi pada pengelolaan keuangan yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas publik di sektor pendidikan tinggi. Penelitian ini juga mengundang penelitian lanjutan untuk menjelajahi lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi implementasi SPIP di konteks pendidikan tinggi, terutama PTN Berbadan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) AAIPI. (2013). Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
- (2) Abdilllah, N. (2017). Peran Auditor Internal dan OTT-KPK. Retrieved from <https://iaa-indonesia.org/peran-auditor-internal-dan-ott-kpk/>
- (3) Adams, M. B. (1994). *Agency Theory and the Internal Audit*. Managerial Auditing Journal, 9(8), 8-12. <https://doi.org/10.1108/02686909410071133>
- (4) Al Twaijry, A. A. M., Brierley, J. A., & Gwilliam, D. . (2004). *An examination of the relationship between internal and external audit in the Saudi Arabian corporate sector*. Managerial Auditing Journal, 19(7), 929-944. <https://doi.org/10.1108/02686900410549448>
- (5) Al-Basith, I. (2019). Pola Kepemimpinan Ideal untuk Pendidikan Tinggi yang Berkualitas.
- (6) Albrecht, W. S., Howe, K. R., & Schueler, D. R. (Eds. . (1988). *Evaluating the Effectiveness of Internal Audit Departments*. Institute of Internal Auditors Research Foundation.
- (7) Ali, A. M., Gloeck, J. D., Ali, A., Ahmi, A., & Sahdan, M. H. (2007). Internal Audit in the State and Local Governments of Malaysia. Southern African Journal of Accountability and Auditing Research, 7(1), 25-57.
- (8) Al-Twaijry, A. A. M., Brierley, J. A., & Gwilliam, D. R. (2003). The development of internal audit in Saudi Arabia: An institutional theory perspective. Critical Perspectives on Accounting, 14(5), 507-531. [https://doi.org/10.1016/S1045-2354\(02\)00158-2](https://doi.org/10.1016/S1045-2354(02)00158-2)
- (9) Alzeban, A., & Sawan, N. (2013). The role of internal audit function in the public sector context in Saudi Arabia. African Journal of Business Management, 7(6), 443-454.
- (10) Anderson, U. (1983). Quality Assurance for Internal Auditing, Institute of Internal Auditors. Florida: Florida: Altamonte Springs.
- (11) Arena, M., & Azzone, G. (2009a). Identifying Organizational Drivers of Internal Audit Effectiveness. International Journal of Auditing, 13, 43-60. <https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2008.00392.x>
- (12) Arena, M., & Azzone, G. (2009b). Internal Audit Effectiveness: Relevant Drivers of Auditees Satisfaction. International Journal of Auditing, 13(1), 43-60.

- (13) Asy'ari, M. A., Prasetyono, & Haryadi, B. (2013). Peran dan Fungsi Satuan Pengawasan Intern dalam Pencegahan Fraud pada Perguruan Tinggi X. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, Vol. 01 No (Oktober), 99–112.
- (14) Badara, M. azu S., & Saidin, S. Z. (2014). Empirical Evidence of Antecedents of Internal Audit Effectiveness from Nigerian Perspective. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 19(4), 460–471. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2014.19.4.1783>
- (15) Baharud-din, Z., Shokiyah, A., & Ibrahim, M. S. (2014). Factors that Contribute to the Effectiveness of Internal Audit in Public Sector. In *International Proceedings of Economics Development and Research*. <https://doi.org/10.7763/IPEDR>.
- (16) Baiden, J. N. E. (2016). Assessing the Balance Score Card of the Internal Audit Performance-Value Addition or Destruction : An Empirical Study of Firms in Sekondi-Takoradi, Ghana. *European Journal of Business and Management*, 8(20), 75–89. <https://doi.org/10.2752/175169712X13182754067340>
- (17) Bass, B. M. (1985). *Leadership and Performance Beyond Expectations*. New York: the Free Press.
- (18) Belay, Z. (2007). A Study on Effective Implementation of Internal Audit Function to Promote Good Governance in the Public Sector. In *In The Achievements, Challenges, and Prospects of the Civil Service Reform program implementation in Ethiopia*” Conference Ethiopian Civil Service College Research, Publication & Consultancy Coordination Office.
- (19) Bronson, S. N., Carcello, J. V., & Raghunandan, K. (2006). Firm characteristics and voluntary management reports on internal control. *Auditing*, 25(2), 25–39. <https://doi.org/10.2308/aud.2006.25.2.25>
- (20) Burns, J. M. (1978). (1978). *Leadership*. New York: Harper and Row.
- (21) Coetzee, P. P. (2016). Contribution of internal auditing to risk management: perceptions of public sector senior management. *International Journal of Public Sector Management*, 29(4).
- (22) Cohen, A., & Sayag, G. (2010a). The effectiveness of internal auditing: An empirical examination of its determinants in Israeli organisations. *Australian Accounting Review*, 20(3), 241–255. <https://doi.org/10.1111/j.1835-2561.2010.00097.x>
- (23) Cohen, A., & Sayag, G. (2010b). The Effectiveness of Internal Auditing: An Empirical Examination of its Determinants in Israeli Organisations, (9724). <https://doi.org/10.1111/j.1835-2561.2010.00092.x>
- (24) Coram, P., Ferguson, C., & Moroney, R. (2006). The value of internal audit in fraud detection. *Papers Presented at the 2006 AFAANZ Conference*, 48(4), 1–32.
- (25) Cosserat, G. W. (2000). *Modern Auditing*. New York: Wiley.
- (26) Crockett, J. R., & Albin, M. J. (1995). The “Roundtable” in the classroom. *Managerial Auditing Journal*.
- (27) Desai, R., & Desai, V. (2010). Towards a Decision Aid for External Audit Evaluation of the Internal Audit Function. *Journal of Global Business Issue*, 4(1), 69.
- (28) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Statistik Pendidikan Tinggi 2020*.
- (29) Dittenhofer, M. (2001). Internal auditing effectiveness: An expansion of present methods. *Managerial Auditing Journal*, 16(8), 443–450. <https://doi.org/10.1108/EUM00000000006064>
- (30) Drogalas, G., Karagiorgos, T., & Arampatzis, K. (2015). Factors associated with Internal Audit Effectiveness: Evidence from Greece. *Journal of Accounting and Taxation*, 7(7), 113–122. <https://doi.org/10.5897/JAT2015.0182>
- (31) Elliott, M., Dawson, R., & Edwards, J. (2007). An improved process model for internal auditing. *Managerial Auditing Journal*, 22(6), 552–565.

- (32) Erasmus, L., & Coetzee, P. (2018). Drivers of stakeholders' view of internal audit effectiveness: Management versus audit committee. *Managerial Auditing Journal*, 33(1), 90–114. <https://doi.org/10.1108/MAJ-05-2017-1558>
- (33) Felix, Jr, W. L., Gramling, A. A., & Maletta, M. J. (2001). *The Contribution of Internal Audit as A Determinant of External Audit Fees and Factors Influencing this Contribution*. *Journal of Accounting Research*, 39(3), 513–534.
- (34) Flesher, D. L. (1996). *Internal Auditing: Standards and Practices: a One-semester Course*. Institute of Internal Auditors.
- (35) Freeman, R. E., & Reed, D. L. (1983). Stockholders and Stakeholders: A new Perspective on Corporate Governance. *California Management Review*, 25(3), 88–106.
- (36) Freeman, R. Edward, Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmer, B. L., & de Colle, S. (2010). The development of stakeholder theory: A brief history. *Stakeholder theory: The state of the art*.
- (37) Hayes, R. (2017) *Principles of Auditing and Other Assurance Services*. Cengage Learning.
- (38) Mihret, D. G., & Yismaw, A. W. (2007). *The Role of Internal Auditing in the Governance Process of Public Sector Entities: The Case of Addis Ababa City Government*. *Manajerial Auditing Journal*, 22(5), 470–484.
- (39) Pickett, K. H. (2018). *Auditing: Assurance and Risk (4th ed.)*. Cengage Learning.
- (40) Sawyer, L. B., Dittenhofer, M. A., & Scheiner, J. C. (2014). *Sawyer's Internal Auditing: The Practice of Modern Internal Auditing (6th ed.)*. IIA Research Foundation.
- (41) Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. John Wiley & Sons.
- (42) Wilcox, M. (2018). *Auditing: A Risk-Based Approach to Conducting a Quality Audit (11th ed)*. Cengage Learning.
- (43) Woloszyk, C. A., & Breathed, D. D. (2003). *Understanding Internal Auditing*. Prentice Hall.